

STRATEGI OPTIMALISASI KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN MUTU HUBUNGAN INTERPERSONAL

Budhi Waskito¹

ABSTRACT

Community empowerment is one of program that implemented by government to alleviate the poverty in Indonesia. The meaning of community empowerment is interpreted in many terms so making the performance of community empowerment program is not optimal. The objective of this paper are to (1) analyze the role of interpersonal relationship to optimize the performance of community empowerment program; (2) analyze strategy for improving the quality of interpersonal relationship in order to optimize the performance of community empowerment. The result of this analysis shows that the top-down pattern of community empowerment must be redesign because the interpersonal relationship is not accomodated. The interpersonal relationship between government and community is a key factor to optimize the performance of community empowerment program. Strategy to optimize the performance of community empowerment through improving the quality of interpersonal relationship can be implemented by using the combination between factor that can rise interpersonal relationship (culture, social, and economic) with communication contex (trust supportiveness, and open-mindedness). To prefer the appropriate strategy, government must consider many factors that are reward, cost, benefit, and comparation level that be accepted by community.

Key words: community empowerment, interpersonal relationship, top down, strategy for improving the quality of interpersonal relationship

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu fenomena di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu diatasi sehingga membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah dan tidak bermartabat. Selain itu, bukan rahasia lagi jika salahsatu penghambat daya saing bangsa ini terletak pada masalah kemiskinan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, diantaranya adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Peningkatan Masyarakat Pesisir (P4K), dan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Program pemberdayaan yang terbaru adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dengan adanya program pemberdayaan ini ditargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2015 menjadi hanya 7,55 persen (Widi 2007).

Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, namun masalah kemiskinan di Indonesia belum dapat terpecahkan. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah, seperti menaikkan harga BBM dan beras, justru menambah panjang daftar masyarakat miskin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berbagai program pemberdayaan di Indonesia belum dapat berjalan secara optimal.

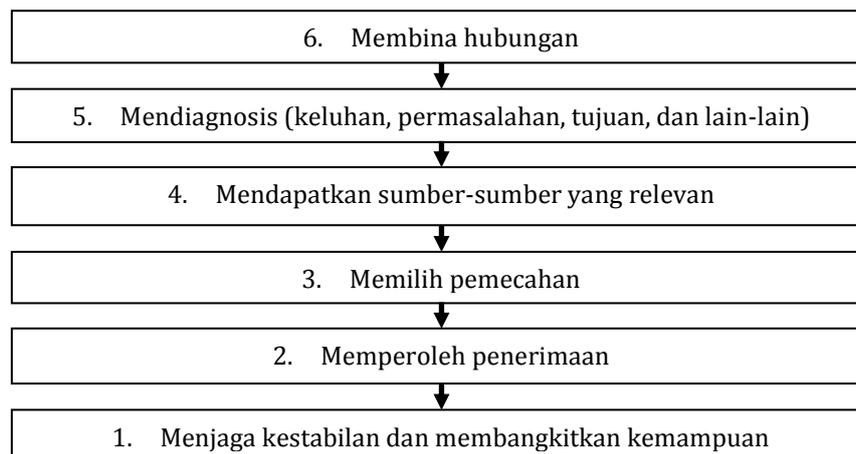
Tidak optimalnya pelaksanaan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan pada dasarnya terjadi karena adanya penyimpangan dalam memahami dan menjalankan program pemberdayaan

¹ Dosen Universitas Bandar Lampung (budhi.waskito@yahoo.co.id)

masyarakat. Widiputranti *et al.* (2005) mengemukakan beberapa penyimpangan dalam memahami dan menjalankan pemberdayaan di Indonesia, diantaranya adalah: (1) pemberdayaan ditempuh pemerintah untuk mengubah masyarakat dengan argumen bahwa problem terletak pada diri masyarakat bukan problem yang bersifat struktural; dan (2) pemberdayaan tidak dijalankan sebagai bentuk pembelajaran dan kemitraan bersama antar subyek, tetapi ada penempatan posisi pemerintah sebagai subyek (yang memberdayakan) dan masyarakat sebagai obyek (yang diberdayakan).

Terjadinya penyimpangan dalam memahami dan menjalankan program pemberdayaan seperti tersebut di atas mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat (pembangunan) dilakukan dari atas ke bawah '*top down*'. Masyarakat diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan sehingga kurang bertanggungjawab terhadap program dan keberhasilannya. Sebagai akibatnya adalah program pemberdayaan yang dilaksanakan kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Bahkan bantuan yang diberikan justru menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahkan masyarakat daripada menolongnya.

Mengingat pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan pembangunan (perubahan sosial), maka pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan partisipasi yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka (Rogers 1983) *dalam* (Nasution 2004). Oleh karena itu, pemerintah sebagai agen perubahan sosial harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tahapan yang benar. Langkah dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat secara teoritis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah sebagaimana tersaji pada Gambar 1.



Sumber: Havelock (1973)

Gambar 1 Langkah agen perubahan dalam perubahan sosial (pemberdayaan masyarakat)

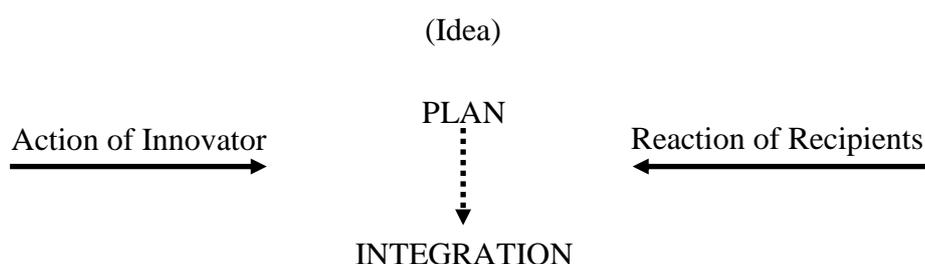
Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa mutu hubungan interpersonal antara agen perubahan dan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama agar kinerja pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang harus dijawab berkaitan dengan hubungan interpersonal dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan hubungan interpersonal dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat ?
2. Bagaimanakah strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu hubungan interpersonal dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat?

TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian *community development* dan *community empowerment*, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial.

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai suatu perubahan sosial yang terjadi karena adanya ide baru dari pembawa ide (innovator) yang ditujukan kepada sasaran (recipients). Ide baru tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengubah pola tradisional ke arah yang lebih efisien. Rencana perubahan (pemberdayaan masyarakat) akan berhasil optimal apabila terjadi integrasi antara ide (dibuat dalam suatu rencana) dengan masyarakat. Dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, usaha dan teknik yang dilakukan inovator untuk meyakinkan sasaran (recipients) akan ide baru (action of innovator) dan kedua, perilaku *recipients* terhadap inovasi yang ditawarkan (reaction of recipients) (Gambar 2).



Gambar 2 Proses inovasi dalam pemberdayaan masyarakat (Niehoff 1966)

Havelock (1973) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan perubahan sosial (pemberdayaan masyarakat) terdapat enam langkah yang harus dilakukan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Dari enam langkah tersebut, membina hubungan dengan masyarakat merupakan langkah pertama yang sangat menentukan langkah berikutnya (Gambar 1).

Rakhmat (2003) menyatakan bahwa peningkatan mutu hubungan interpersonal ke arah yang lebih akan mengakibatkan berbagai hal yang sangat positif sehingga sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Akibat positif yang ditimbulkan dari makin meningkatkannya mutu hubungan interpersonal tersebut adalah: (1) makin terbukanya orang untuk mengungkapkan dirinya; (2) makin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya; dan (3) makin efektifnya komunikasi yang berlangsung diantara komunikasikan (agen perubahan dan masyarakat sasaran).

Dalam menumbuhkan atau meningkatkan mutu hubungan interpersonal terdapat tiga faktor penting yang harus diperhatikan oleh agen perubahan (innovator), yaitu:

1. Percaya (trust), yaitu mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko (Giffin 1967 *dalam* Rakhmat 2003).
2. Sikap suportif (supportiveness), sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. (Gibb 1961 *dalam* Rakhmat 2003) menyebut enam perilaku yang menimbulkan sikap suportif, yaitu: deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme.
3. Sikap terbuka (open-mindedness), yaitu sikap yang berpengaruh besar dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal yang efektif. Karakteristik sikap terbuka (Brooks dan Emmert 1977 *dalam* Rakhmat 2003) adalah (1) menilai pesan secara obyektif; (2) membedakan dengan mudah; (3) berorientasi pada isi; (4) mencari informasi dari berbagai sumber; (5) lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah kepercayaannya dan (6) Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya.

Model pertukaran sosial (social exchange model) merupakan salah satu model yang digunakan dalam menganalisa hubungan interpersonal. Model ini memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya.

Thibault & Kelley *dalam* Rakhmat (2003) menyatakan bahwa asumsi dasar yang mendasari analisis model pertukaran sosial adalah bahwa setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal dalam hubungan sosial hanya selama hubungan tersebut cukup memuaskan ditinjau dari segi ganjaran dan biaya. Bila seseorang individu merasa tidak memperoleh laba sama sekali dalam suatu hubungan interpersonal, ia akan mencari hubungan lain yang mendatangkan laba. Dalam model pertukaran sosial terdapat empat konsep pokok, yaitu:

1. Ganjaran, yaitu setiap akibat positif yang diperoleh dari suatu hubungan.
2. Biaya, yaitu setiap akibat negatif yang terjadi dalam suatu hubungan.
3. Hasil atau laba, yaitu ganjaran dikurang dengan biaya.
4. Tingkat perbandingan, yaitu ukuran baku (standar) yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang.

PERANAN HUBUNGAN INTERPERSONAL DALAM OPTIMALISASI KINERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kinerja berbagai program pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang belum secara optimal mampu mengentaskan kemiskinan mengindikasikan bahwa

pola pemberdayaan masyarakat yang bersifat “*top down*” perlu dikaji ulang. Partisipasi masyarakat secara luas dalam pemberdayaan merupakan suatu hal yang pantas untuk dilakukan dengan jalan membuka komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah.

Dengan adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan dengan optimal (sesuai dengan rencana yang telah disusun) karena terjadi integrasi antara masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini akan dapat terwujud apabila mutu hubungan interpersonal antara pemerintah dan masyarakat sangat baik.

Pola pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang selama ini dilakukan secara “*top down*” dipastikan telah mengabaikan mutu hubungan interpersonal antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, maka sangat wajar apabila dalam pemberdayaan masyarakat di Indonesia selama ini tidak terjadi integrasi antara masyarakat dengan pemerintah (kinerja pemberdayaan masyarakat tidak optimal).

Berkaitan dengan hal tersebut, mutu hubungan interpersonal antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena membina hubungan (penumbuhan hubungan interpersonal) merupakan langkah pertama yang dapat menentukan kinerja (keberhasilan atau kegagalan) dari langkah pemberdayaan masyarakat (perubahan sosial) selanjutnya (Gambar 1).

Dengan demikian, maka dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, peningkatan mutu hubungan interpersonal (antara pemerintah sebagai *innovator* dan masyarakat sebagai *recipients*) merupakan hal utama yang harus dilakukan karena berpotensi dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU HUBUNGAN INTERPERSONAL

Dalam “*The first World Congress on Communication for Development*” pada 2006 dinyatakan bahwa komunikasi adalah kontekstual. Tidak ada satu pun pedoman komunikasi yang dapat diaplikasikan dalam semua situasi. Oleh karena itu maka komunikasi seharusnya diaplikasikan sesuai dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan pengertian komunikasi pembangunan tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan mutu hubungan interpersonal dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi tergantung dari konteksnya.

Peningkatan mutu hubungan interpersonal dalam setiap konteks komunikasi (budaya, sosial dan ekonomi) akan dapat berjalan dengan optimal apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal (percaya, sikap suportif, dan sikap terbuka). Dengan kata lain strategi peningkatan mutu hubungan interpersonal dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara konteks yang terjadi dengan faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal. Dengan demikian, maka peningkatan mutu hubungan interpersonal (antara pemerintah sebagai *innovator* dan masyarakat sebagai *recipients*) dapat dilakukan dalam sembilan pilihan strategi (Tabel 1).

Tabel 1 Strategi peningkatan mutu hubungan interpersonal untuk mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat

Konteks Komunikasi (Contex)	Faktor Yang Menumbuhkan Hubungan Interpersonal (Interpersonal Relationship)		
	Percaya (Trust) -IT-	Sikap Suportif (Supportivenes) -IS-	Sikap Terbuka (Open-Mindedness) -IO-
Budaya (Cultural) -CC-	Strategi 1: CC – IT	Strategi 2: CC – IS	Strategi 3: CC – IO
Sosial (Social) -CS-	Strategi 4: CS – IT	Strategi 5: CS – IS	Strategi 6: CS – IO
Ekonomi (Economic) -CE-	Strategi 7: CE – IT	Strategi 8: CE – IS	Strategi 9: CE – IO

Optimalisasi kinerja pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan mutu hubungan interpersonal pada dasarnya dapat dilakukan dengan melakukan sembilan strategi seperti tersaji pada Tabel 1. Namun demikian, agar terjadi efisiensi dalam hal waktu dan biaya, maka *innovator* (pemerintah) pemberdayaan masyarakat harus memilih strategi yang tepat dan sesuai dengan sasarannya.

Mengingat hubungan interpersonal dapat dipandang sebagai suatu transaksi dagang (model pertukaran sosial), pemilihan strategi yang tepat dari sembilan strategi pada Tabel 1 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang timbul dilihat dari berbagai segi (ganjaran, biaya, manfaat, dan tingkat perbandingan) yang diterima oleh masyarakat dari masing-masing strategi.

Oleh karena masyarakat mengharapkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dari setiap hubungan interpersonal yang dilakukan, maka *innovator* (pemerintah) sebaiknya memilih strategi peningkatan hubungan interpersonal yang dapat memberikan manfaat (ganjaran dikurangi biaya) yang paling besar bagi masyarakat dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Hubungan interpersonal memiliki peran yang sangat penting (sebagai kunci utama) dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat karena dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
2. Strategi peningkatan mutu hubungan interpersonal dapat dilakukan dalam berbagai konteks (budaya, sosial dan ekonomi) dengan menggunakan berbagai faktor yang dapat menumbuhkan hubungan interpersonal (percaya, sikap suportif dan sikap terbuka).

3. Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal (ganjaran, biaya, manfaat dan tingkat perbandingan) yang diterima masyarakat dalam memilih strategi peningkatan mutu hubungan interpersonal yang tepat.
4. Strategi peningkatan mutu hubungan interpersonal yang memberikan manfaat (ganjaran dikurangi biaya) terbesar dapat dipilih pemerintah sebagai strategi yang digunakan dalam mengoptimalkan kinerja pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Havelock RG. 1973. *The Change Agenst's Guide to Innovation in Education*. Englewood Cliffs. NJ: Educational Technology Publications.
- Nasution Z. 2004. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Edivis Revisi. Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.
- Niehoff AH. 1966. *A Casebook of Social Change*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Rakhmat J. 2003. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supriyanto, Subejo. 2004. Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan. Buletin Ekstensia-Pusat Penyuluhan Pertanian Deptan RI Vol 19/Th XI/2004.
- Widi N. 2007. Mencermati Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Jawa Pos, Selasa 22 Mei 2007. http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=286347
- Widiputranti CS, Hardjono, Hartono, Hastowiyono, Darori M, Ruswahyuningsih, Tiurmida N, Dorojati R, Angeningsih R, Sumarjono, Anadarsih WM. 2005. *Pemberdayaan Kaum Marjinal*. Yogyakarta: APMD Press.